

PANDANGAN KIAI TENTANG DERADIKALISASI PAHAM ISLAM RADIKAL DI KOTA SEMARANG

Kiai's views on deradicalization of islamic radicalism in Semarang

ABU ROKHMAD

Fakultas Dakwah dan Komunikasi
IAIN Walisongo Semarang
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 (Kampus
III) Ngaliyan, Semarang
Telp. (024) 7606405 Facs. (024)
7606405
e-mail: abu_rokhammad@yahoo.com
Naskah diterima: 24 Januari 2014
Naskah direvisi: 19-30 Mei 2014
Naskah direvisi: 22 Juni 2014

ABSTRACT

The face of Islamic moderate in Indonesia changed since the decline of new era regime in 1998. Hardliner moslem communities grew in society. They didn't embarrassed to use violent ways, even terrorism. Nowadays radicalism isthe most important problems faced bythe moslem society in Indonesia. The participation of kiai was badly needed to handle radicalism problems. This article studies the views of kiai about the roots of Islamic radicalism and the strategies of kiai to deradicalize Islamic radicalism. The conclusion of this article were: first, the root of radicalism becaused of two factors: religius factor that is literal understanding or misunderstanding of religious texts, and the political factor related to national and global issues. Second, there were two forms of deradicalization, related to the characteristics of the subject of radicalism: preventive deradicalization and curative deradicalization.

Keywords: *islamic radicalism, radicalism, deradicalization, kiai.*

ABSTRAK

Wajah Islam moderat di Indonesia kian berubah sejak rezim Orde Baru tumbang pada 1998. Kelompok-kelompok Muslim garis keras tumbuh subur di masyarakat. Mereka tidak segan berdakwah dengan cara kekerasan bahkan terorisme. Radikalisme menjadi masalah penting bagi umat Islam Indonesia dewasa ini. Keterlibatan kiai dalam menangani masalah radikalisme (deradikalisasi) sangat diharapkan. Artikel ini mengkaji dua hal. Pertama, bagaimana pandangan kiai tentang akar radikalisme Islam? dan Kedua, bagaimana strategi kiai dalam melakukan deradikalisasi paham Islam radikal? Kesimpulan artikel ini adalah: Pertama, akar radikalisme disebabkan dua faktor besar, yaikni faktor pemahaman agama yang kurang tepat dan faktor politik yang berhubungan isu nasional dan global. Kedua,terdapat dua model deradikalisasi, tergantung sifat dari pelaku radikalisme: deradikalisasi pencegahan (preventive deradicalization), dan deradikalisasi penyembuhan (curative deradicalization).

Kata kunci: *Islam Radikal, Radikalisme, Deradikalisasi, Pesantren, Kiai.*

PENDAHULUAN

Sejak awal kelahirannya, wajah Islam di nusantara berwatak moderat dan toleran. penduduk Indonesia yang sebelumnya memeluk beragam agama beralih menjadi Muslim tanpa paksaan. Pengislaman Nusantara dilakukan dengan kontak dagang, perkawinan dan akulturasi budaya. Islam disebarkan secara halus, dan membaur dengan berbagai tradisi yang telah ada sebelumnya (Mudzhar, 1993: 18-9).

Walisongo sebagai tokoh sentral penyebar Islam di Indonesia, khususnya di Jawa, menggunakan metode dakwah yang akomodatif dan lentur. Dalam bidang akidah, digunakan model dakwah persuasif dengan memperhatikan situasi, adat istiadat dan watak masyarakat setempat tanpa mengorbankan syari'at Islam (Sofwan, 2004: 6).

Model penyebaran Islam seperti ini membuat masyarakat tidak resisten menerima Islam. Yang tetap setia dengan agama lamanya, sama nyamannya dengan mereka yang ingin berganti agama baru. Mereka menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Pola pikir dan sikap keberagaman mereka berada di jalan tengah (moderat). Sikap moderat dapat terbentuk karena Muslim nusantara tidak memiliki pengalaman traumatik berbenturan dengan agama lain. Tidak ada peperangan dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara.

Namun, wajah Islam moderat kian berubah sejak Orde Baru tumbang. Era reformasi itu melahirkan perkembangan penting pada masyarakat Islam, salah satunya adalah munculnya kelompok Muslim radikal (*hardliners*) (Salim dan Azra, 2003). Menurut Ansyad Mbai (Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), terdapat lima tipologi kelompok radikal, yaitu radikal gagasan (Hizbut Tahrir Indonesia/ HTI, Majelis Mujahidin Indonesia/ MMI), radikal non-teroris (Front Pembela Islam/ FPI), radikal milisi (Laskar Jihad), radikal separatis (Negara Islam Indonesia/ NII), dan radikal teroris (Jama'ah Islamiyah) (Mbai, 2011).

Cukup banyak data terbaru tentang radikalisme dan terorisme yang terjadi belakangan. Tahun 2011 terjadi aksi bom buku, bom bunuh diri di masjid Mapolresta Cirebon, bom di Serpong dan bom bunuh diri di Kepunton Solo. Pertengahan tahun 2012, terjadi teror bom di pos penjagaan polisi di Gladak Solo (Solo Pos, 19/8/2012), lalu diikuti dengan penembakan terhadap pengendara motor yang diduga pelaku teror (Tempo.co, 4/9/2012). Tahun 2013 terjadi perburuan Densus 88 terhadap jaringan teroris Poso di Makassar (Banjarmasin Post.co.id/ 21 Pebruari 2013). Penembakan terhadap terduga teroris juga terjadi di awal tahun 2014 di Ciputat Banten (majalah.tempo.co/penembakan terduga teroris/ 13 Januari 2014).

Data di atas menunjukkan bahwa radikalisme yang berpuncak pada aksi terorisme merupakan masalah serius yang patut dikaji lebih dalam. Radikalisme dan terorisme menjadi dua isu yang telah menyebabkan Islam dicap sebagai agama teror dan umat Islam dianggap menyukai jalan kekerasan suci untuk menyebarkan agamanya. Sekalipun anggapan itu mudah dimentahkan, namun fakta bahwa pelaku teror itu Muslim garis keras sangat membebani psikologi umat Islam secara keseluruhan.

Perlu langkah strategis dan komprehensif untuk mengurai akar masalah radikalisme dan upaya deradikalisasi. Pendekatan yang digunakan dalam memerangi radikalisme dan terorisme mestinya lebih komprehensif dan integral, yakni perpaduan antara hukum, keamanan, kesejahteraan, sosial dan keagamaan. Dengan demikian, dibutuhkan partisipasi berbagai pihak dalam menangani masalah radikalisme dan terorisme ini, salah satunya dari kiai yang mengasuh pesantren. Artikel ini mengkaji dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana pandangan kiai tentang akar radikalisme Islam? dan *Kedua*, bagaimana kiai melakukan deradikalisasi paham Islam radikal?

Artikel ini merupakan pengembangan penelitian yang penulis lakukan pada tahun 2011 tentang akar radikalisme dan deradikalisasi

paham Islam. Lokasi penelitian di Semarang. Penggalan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada sejumlah kiai yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam artikel ini, nama pesantren dan nama kiai sengaja disembunyikan untuk menjaga hak informan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akar-akar Radikalisme

Radikalisme Islam adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka (Nasution, 1995: 124). Fealy dan Hooker mendefinisikan Islam radikal (*radical Islam*) sebagai gerakan Islam yang hendak melakukan perubahan dramatis baik di masyarakat maupun Negara (2006: 4). Kelompok yang berpandangan seperti itu, selain disebut Islam radikal juga digunakan istilah neo-khawarij (Shaban, 1994: 56).

Al-Jabiri menggunakan istilah ekstrimisme untuk menggambarkan kelompok Islam radikal. Bahkan al-Jabiri menyebutkan bahwa musuh bebuyutan Islam ekstrem adalah kelompok yang paling dekat dengannya, yaitu Islam moderat (Al-Jabiri, 2001: 139-149). Al-Asymawi juga menggunakan istilah ekstrimisme untuk menyebut kelompok yang ingin merebut kekuasaan dengan menunggangi isu agama (1987: 66). Lalu, apa akar radikalisme Islam itu?

Ibarat sebatang pohon, akar (*roots*) adalah pokok atau inti kehidupannya. Pohon akan tumbuh jika akarnya menancap kuat ke dalam tanah. Sebaliknya, pohon akan meranggas dan segera mati bila akarnya mudah dicabut dari tempatnya.

Akar radikalisme dapat dikonseptualisasikan seperti paparan di atas. Radikalisme ibarat sebatang pohon. 'Batang pohon' radikalisme dapat tumbuh subur, besar dan kuat manakala akarnya juga besar dan kuat. Hanya tanah yang subur yang dapat menumbuhkan akar radikalisme. Radikalisme dapat mengecil bahkan mati bila akarnya dicabut dari tempat pertumbuhannya, yakni masyarakat yang sejahtera dan demokratis.

Berdasarkan wawancara penulis terhadap para kiai sebagai informan penelitian ini, ditemukan tiga faktor besar akar radikalisme atau faktor penyebab utama seseorang menjadi radikal.

Pertama, faktor pemahaman agama yang kurang tepat dan harfiah. Pemahaman ini menyangkut isu pemurnian tauhid, *taghyir al-munkar* (merubah kemungkaran dengan cara kekerasan), relasi Muslim dan non-Muslim, pemaknaan doktrin jihad dan NKRI bukan negara Islam.

Soal proyek pemurnian tauhid misalnya, tidak ada yang membantah kebenaran motif dan tujuan mereka. Bukankah keesaan Allah Swt harus dijaga kemurniannya dari segala syirik? Hampir seluruh umat Islam menyadari kebenarannya. Permasalahan yang kemudian muncul adalah terkait dengan dua hal. Yang kesatu soal klaim kebenaran pemahaman mereka terhadap doktrin tauhid, tidak hanya terhadap ayat dan hadits yang jelas maknanya (*muhkamat*), tapi juga ayat dan hadits yang masih samar maknanya (*mutasyabihat*). Mereka umumnya tidak mengakui adanya *ikhtilaf* (perbedaan) pendapat. Yang kedua, cara mereka yang keras dan kasar terhadap orang lain yang berbeda. Mereka gampang menyebut orang lain sebagai ahli bid'ah, kafir, *thaghut* dan seterusnya.

Jadi, seorang Muslim radikal dapat disebut hebat dalam masalah akidah, ibadah, dan fiqh, tetapi gagal membangun pribadinya dengan akhlak yang mulia. Padahal dibanding dengan aspek ajaran Islam Islam yang lain (akidah, ibadah, fiqh/ hukum), masalah akhlak juga tidak kalah pentingnya. Ibn al-Qayyim mengatakan: "semua isi agama adalah akhlak, dan barangsiapa bertambah akhlaknya maka bertambah pula agamanya." (Abdullah, 2009: 79). Inilah yang menjadi misi penting Rasulullah Saw ketika diutus menjadi rasul. "Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak" (*innama buistu liutammima makara al-akhlak*) (HR. Bukhari, Hakim dan Baihaqi).

Relasi Nabi Muhammad Saw dengan non-Muslim memang tidak semuanya diungkapkan dalam bahasa yang santun. Bahkan misalnya, ada

hadits yang berbunyi: *"umirtu an uqatil al-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah, fa man qala la ilaha illa Allah faqad 'ashama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah.* (Diperintahkan kepadaku memerangi orang sampai mereka mengucapkan "La Ilaha Illa Allah". Barangsiapa mengucapkan "La Ilaha Illa Allah" maka ia akan terjaga harta dan dirinya dariku, kecuali ada alasan yang membenarkannya, dan perhitungannya ada di sisi Allah. (HR. Bukhari).

Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah Saw ditanya tentang orang yang berperang karena keberaniannya dan karena Allah Swt, Nabi Muhammad Saw bersabda: *"Man qaatala litakuna kalimat Allah hiya al-'ulya fa huwa fi sabil Allah 'azza wa jalla."* (Barangsiapa berperang untuk menegakkan kalimat Allah maka ia berada di jalan Allah). (HR. Bukhari).

Kelompok radikal memahami hadits di atas secara harfiyyah dan dilepaskan dari konteks sosialnya. Tentu pemahaman seperti itu kurang tepat. Tanpa bermaksud menafikan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (yang sudah pasti sahih) di atas, hadits di atas dan sejenisnya tidak bisa ditelan mentah-mentah dan langsung diamalkan seperti bunyi harfiyahnya. Mesti harus dilihat, bagaimana *asbab al-wurudnya*, konteks sosial dan politik saat itu dan sekarang, dan seterusnya. Dengan demikian akan ditemukan pemaknaan yang lebih proporsional dan logis. Tidak mungkin umat Islam mengisolasi diri dari hubungan dengan umat agama lain.

Kedua, faktor yang membuat seorang Muslim menjadi radikal adalah faktor politik. Faktor ini berhubungan dengan soal situasi politik global di mana sebagian umat Islam merasa berhak untuk menuntut balas atas ketidakadilan dan kesewenang-wenangan AS dan Eropa terhadap dunia Islam. Termasuk didalamnya adalah simpati dan solidaritas atas penderitaan yang dialami oleh dunia Islam (Palestina, Afghanistan, dan Irak). Konspirasi Barat dan AS untuk mendiskreditkan dan menyudutkan umat Islam dengan cara merancang dan menciptakan istilah Islam radikal untuk dijadikan 'musuh bersama' juga menjadi

sebab seorang Muslim menjadi radikal.

Situasi politik nasional yang tidak kunjung keluar dari krisis multi-dimensi, baik krisis politik, ekonomi, hukum, dan moral, juga mendorong sebagian umat Islam untuk bertindak radikal. Situasi ini menimbulkan keinginan sebagian umat Islam untuk menawarkan sistem dan ideologi alternatif. Termasuk didalamnya adalah isu tentang formalisasi Syari'at Islam, cita-cita mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) atau ide tentang *khilafah Islamiyyah*.

Dua faktor di atas terlihat saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Faktor yang pertama mendapat penguat dari faktor kedua, misalnya berupa ketidakadilan AS dan Eropa terhadap dunia Islam. Begitu pula dengan faktor kedua, ia mendapat legitimasi dari teks-teks agama.

Di luar dua faktor di atas, sebagian kecil informan menyebut adanya faktor kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Memang benar kalau kemiskinan bisa menyebabkan seseorang menjadi nekat. Lebih-lebih bila yang miskin itu sudah memiliki keyakinan yang salah, soal doktrin jihad misalnya: semua orang yang berbeda agama dianggap kafir, dan oleh karena itu boleh diperangi.

Menurut peneliti, dua faktor ini bukan menjadi penyebab utama tetapi sebagai penyubur radikalisme. Sebab tidak semua orang miskin menjadi radikal, begitu pula tidak semua masyarakat yang mengalami kesenjangan sosial berubah menjadi radikal.

Seseorang yang mengaku memperjuangkan Islam tapi menggunakan kekerasan sejatinya bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab prinsip yang menjadi pegangan ulama Ahlussunnah wal-jama'ah menegaskan tujuan tidak bisa membenarkan cara (*al-ghayah la tubarrir al-washilah*) atau sesuatu yang baik hendaknya ditempuh dengan cara yang baik (*man kana amruhu ma'rufan fal-yakun bi ma'rufin*) (Wahid, 2009: 92).

Deradikalisasi Paham Radikal

Pada dasarnya deradikalisasi merupakan proses meyakinkan kelompok radikal untuk

meninggalkan penggunaan kekerasan dalam bertindak. Deradikalisasi dapat berkaitan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi “*root causes*” (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan radikal (ICG, 2007). Deradikalisasi juga dapat bermakna bahwa menyebarkan kebaikan (agama) tidak boleh menggunakan cara yang tidak baik (kekerasan). Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan ide yang selalu ada dalam terorisme (Hendropriyono, 2009: 34).

Dalam konteks perang terhadap terorisme, konsep deradikalisasi, harus dijadikan sebagai “kontra-ideologi (radikalisme) terorisme” yang melembaga (dan membudaya) dalam kehidupan masyarakat sampai pada lapisan paling terbawah. Konsep deradikalisasi perlu diperkuat dengan komitmen pemerintah untuk meniadakan ketidakadilan sosial dan ekonomi masyarakat (Atmasasmita, 2011). ‘Meniadakan ketidakadilan sosial dan ekonomi’ ini sama artinya dengan mengampunasi lahan-lahan subur tempat tumbuh dan berkembangnya radikalisme-terorisme.

Dalam rangka untuk mengkoordinasikan seluruh potensi Negara untuk menangkal dan menanggulangi radikalisme dan terorisme di Indonesia, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berdasar Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Kegiatan penangkalan dan penanggulangan teror, antara lain meliputi kemampuan deteksi dini, cegah dini, penanggulangan, pengungkapan, rehabilitasi akibat teror, dan yang tidak kalah pentingnya adalah deradikalisasi.

Secara resmi, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan terorisme dititikberatkan kepada dua hal, yaitu: (1) Upaya penegakan hukum secara adil dan transparan; dan (2) Upaya *counter-radicalism* (program deradikalisasi) untuk menetralkan ideologi radikal yang menjadi pemicu utama terjadinya aksi terorisme (Mbai, 2011). Yang terkait dengan point nomor (2), BNPT memiliki direktorat deradikalisasi yang salah satu tugas utamanya adalah menyusun program deradikalisasi.

Dalam berbagai kesempatan, kepala BNPT Ansyad Mbai menyampaikan dua strategi dalam proses deradikalisasi terorisme, yaitu (1) pencegahan; dan (2) penindakan. Strategi pencegahan berhubungan dengan tindakan preventif atau deteksi dini sebelum aksi teror terjadi. Sedangkan strategi penindakan dilakukan setelah aksi teror terjadi. Strategi ini berupa penangkapan dan penyidikan terhadap orang-orang yang diduga pelaku terorisme. Dalam proses peradilan hingga mendapat keputusan hukum tetap dan menjalani proses pemidanaan (sebagai napi), BNPT tidak lagi bertanggung jawab terhadap pelaku terorisme tersebut.

Deradikalisasi tahap pencegahan ini sangat penting dan memegang kunci bagi keberhasilan penanggulangan atau penghentian radikalisme Islam di Indonesia. Jika tahap ini berhasil, maka deradikalisasi pada tahap berikutnya tidak dibutuhkan lagi. Asumsinya, jika radikalisme beragama tidak berkembang, maka kemungkinan besar tidak ditemukan lagi aksi-aksi terorisme di Indonesia. Sejalan dengan itu, strategi penindakan juga tidak dibutuhkan, begitu pula dengan deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan.

Sasaran dan target deradikalisasi tahap pencegahan adalah masyarakat luas, baik yang sudah mengidap virus radikalisme dan terutama yang belum terkena pengaruh radikalisme. Dengan menggandeng banyak pihak, baik lembaga negara maupun peran serta masyarakat, program deradikalisasi ini sangat positif bagi upaya mendorong umat Islam agar tetap menjadi muslim yang moderat dan menyebarkan Islam dengan cara damai.

Deradikalisasi tahap penindakan lebih banyak berkaitan dengan wilayah penegakan hukum yang dilakukan oleh BNPT, kepolisian, kejaksaan dan hakim yang memutuskan perkara terorisme. Tahap ini lebih banyak mengandalkan *show of force* dari aparat untuk menjaga kewibawaan negara. Sekalipun dapat dikatakan terlambat karena radikalisme sudah berbuah teror dalam bentuk nyata, upaya deradikalisasi tetap dilakukan sekalipun dengan sasaran

terbatas, yaitu pelaku teror dan jaringannya. Di sela-sela menjalani proses hukum, tersangka atau terdakwa dapat disentuh hatinya agar menyadari kekeliruan yang baru saja dilakukan. Aparat hukum, terutama kepolisian, dapat memainkan diri sebagai ustadz-ustadz mitra dialog pelaku radikalisme beragama.

Deradikalisasi pada saat pelaku menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Penelitian yang dilakukan oleh International Crisis Group (ICG) menunjukkan bahwa upaya-upaya deradikalisasi di Indonesia, betapapun kreatifnya, tidak dapat dinilai secara terpisah dan kemungkinan akan gagal kalau tidak dimasukkan kedalam sebuah program reformasi penjara yang lebih luas. Situasi penjara yang korup, penuh kekerasan serta pengawasan para sipir yang buruk membuat upaya deradikalisasi perlu dikaji (ICG, 2007). Kondisi ini membuat pelaku radikalisme mengulang kembali perbuatannya (menjadi residivis) setelah keluar dari penjara.

Deradikalisasi di Lapas dapat menggunakan pendekatan (bimbingan dan) konseling dengan tujuan untuk mengubah penafsiran ayat-ayat penting yang telah diinterpretasikan dengan keliru; menjauhi atau membebaskan dari kelompok jihadi tertentu; atau membantu upaya rehabilitasi dan reintegrasi napi jihadi ke dalam masyarakat. Strategi ini dapat meliputi program-program dakwah masyarakat untuk mencegah kelompok-kelompok yang rentan terhadap ideologi radikal lewat kunjungan *face to face* ke penjara (ICG, 2007).

Cerita dari Jafar M. Sodik mengenai Hamoud al-Hitar dapat mengilustrasikan keberanian seorang ulama dalam meluruskan pemikiran keras pelaku radikal dengan mengunjungi para tervonis teroris di berbagai penjara di Yaman. Dalam dialognya, al-Hitar mengatakan (Sidik, 2011):

"Jika kalian bisa meyakinkanku bahwa pemikiran-pemikiran kalian dibenarkan oleh Alquran, maka aku akan bergabung dalam kalian," tantang al-Hitar kepada teroris-teroris itu. "Tapi jika aku yang berhasil meyakinkan kalian, maka kalian harus menanggalkan metode keras kalian." Tantang al-Hitar.

Dengan metode dialog sepercaya diri itu, al-Hitar berhasil meredakan radikalisme dan kekerasan ekstrem orang-orang Yaman rekrutan Alqaeda. Hasilnya, sejak Desember 2002, serangan teroris di Yaman menyusut, kendati Yaman dinilai banyak orang akan menjadi ibukota teror.

Apa yang dilakukan al-Hitar, dalam batas tertentu, menggunakan pendekatan konseling di mana tervonis teroris dipersilahkan untuk mengungkapkan keyakinannya dengan garansi besar berupa 'barter keimanan' seperti itu. Dengan pendekatan empati dan simpati, tertutup apapun seseorang akan terbuka pelan-pelan, bila digunakan sentuhan psikologis yang tepat. Secara teoritis, penerapan konseling untuk deradikalisasi Islam radikal kiranya sangat mungkin dilakukan mengingat fungsinya untuk pencegahan (*preventif*), penanggulangan (*terapeutik*), pemeliharaan (*preservative*) dan pengembangan (*developmental*).

Kalau dibawa selangkah lebih jauh, program-program deradikalisasi dapat dimaksudkan untuk memperkuat institusi-institusi "moderat"—sebuah pendekatan yang penuh lubang jebakan—atau dengan menanggapi ketidakpuasan sosial dan ekonomi di daerah-daerah di mana marjinalisasi dan diskriminasi telah mendorong ekstrimisme. Program deradikalisasi ditujukan kepada napi teroris, tersangka teroris, keluarga napi teroris dan tersangka, anggota organisasi teroris yang belum terlibat aksi teror, dan para simpatisan. Program deradikalisasi terorisme bersifat humanis dan *soul approach* (pendekatan jiwa) sehingga program ini tidak akan bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) (ICG, 2007).

Program deradikalisasi adalah keharusan agar yang radikal menjadi moderat (*curative deradicalization*), dan yang moderat tidak menjadi radikal (*preservative and preventive deradicalization*). Program ini sama sekali tidak bermaksud menghalangi orang Islam untuk menjadi muslim sejati, atau apalagi menjadikannya berIslam setengah hati. Deradikalisasi adalah program dakwah yang *rahmatan lil 'alamin*, dan mendudukkan doktrin

agama tepat pada tempatnya. Pemerintah dan umat Islam bertanggung jawab atas pengibaran panji-panji Islam yang damai dan tidak menebar kebencian dan kekerasan bagi sesama.

Dengan demikian, deradikalisasi Islam radikal bertujuan untuk mengurangi—atau menghentikan—pandangan, sikap dan tindakan keagamaan di kalangan pemeluk Islam yang dinilai “tidak patut” dalam konteks bernegara, dan berkehidupan sosial. Dikatakan tidak patut karena radikalisme keadilan hanya menimbulkan mafsadat (kekerasan, kebencian, saling mengkafirkan) dan tidak menjadikan berkah bagi umat Islam (Thohir, 2011).

Menurut para kiai, perbuatan radikal itu (apalagi sampai dalam bentuk teror) bersumbu dari paham. Oleh karena itu, untuk menangkal radikalisme (deradikalisasi), maka yang ditangkal adalah pahamnya. Menangkal paham semakna dengan istilah kontra-ideologi, yaitu mengkonfrontasi satu paham dengan paham lain yang bertolak belakang. Tujuannya untuk—minimal—mengacaukan atau kalau tidak malah membongkar bangunan paham yang diyakini kebenarannya, dengan menawarkan paham lain yang berbeda, lebih kuat dan tentu yang lebih mendekati kebenaran.

Jika paham itu bersumber dari ajaran agama, maka ayat al-Qur’an atau hadits yang sama ditafsiri dengan makna yang berbeda. Setelah itu akan tampak, mana tafsir yang lebih kuat dan mendekati dengan inti ajaran Islam. Misalnya, ayat atau hadits soal jihad. Berdasarkan ayat atau hadits tersebut, didialogkan dan diperdebatkan antara kedua belah pihak (radikalis dan deradikalis) apakah sama atau beda antara jihad dengan teror. Tema-tema yang menjadi acuan kelompok Islam radikal, seperti relasi Islam dan non-Islam, ide tentang Negara Islam dan sebagainya didudukkan sedemikian rupa sehingga menjadi bahan deradikalisasi.

Pada dasarnya watak itu dapat dibentuk. Begitu pula dengan karakter (radikal). Hal itu tergantung dari bagaimana seseorang belajar agama. Seseorang yang sejak kecil belajar agama,

hasilnya akan berbeda dengan orang yang setelah dewasa baru belajar agama. Kadang-kadang pada diri seseorang, ada masa kosong (peralihan) sehingga rentan terhadap pengaruh orang lain. Oleh karena itu, untuk menanggulangi Islam radikal, harus melalui pemahaman terhadap Islam dari berbagai ilmu, baik ilmu syari’ah sampai ilmu tasawuf.

‘Memahami Islam dari berbagai ilmu’, menurut kiai di atas, berarti mengkaji Islam di dalam berbagai aspeknya sehingga lebih komprehensif dan tidak parsial. Dengan cara demikian, suatu dalil (al-Qur’an atau hadits) selalu tidak berdiri sendiri. Ada teks (nash) di satu sisi, dan konteks di sisi lain. Teks (nash) pun harus dihubungkan teks-teks yang lain, baik dengan sesama ayat al-Qur’an maupun al-hadits. Konteks yang dulu dengan konteks yang sekarang juga harus dipertimbangkan supaya ditemukan pemahaman yang tepat untuk itu. Kalau seseorang mau memahami Islam dengan cara demikian, kemungkinan besar ia tidak akan menjadi muslim yang radikal.

‘Memahami Islam dari berbagai ilmu’ juga berkaitan dengan persoalan makna teks (Islam, doktrin, jihad, misalnya) yang rumit. Apakah kebenaran makna diciptakan dan dikandung oleh teks itu sendiri; atau digenggam oleh pencipta teks; atau makna dibentuk oleh pembaca. Mengejar ‘makna yang sesungguhnya’ tentu bukan perkara gampang. Karena tidak mudah, mestinya tidak ada seorangpun yang berhak mengklaim pendapatnya paling benar. Boleh jadi, pendapat orang lain juga benar. Sikap mental yang seperti ini tampaknya tidak dimiliki oleh kelompok Islam radikal.

Menurut seorang kiai yang tinggal di Mangkang, untuk menanggulangi radikalisme harus dipetakan dulu jenis atau tingkatan orang yang radikal tersebut. *Pertama*, sekelas pimpinan atau ideolog. Umumnya mereka sudah tidak mempan diajak duduk bersama. Cara untuk ‘menjinakkan mereka’ adalah kampanye besar-besaran tentang doktrin-doktrin mereka yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kampanye dapat

dilakukan lewat media massa maupun elektronik, termasuk lewat mimbar-mimbar Jum'at, majlis taklim, jama'ah pengajian dan lain sebagainya. Kampanye seperti ini mengarah kepada dua pihak sekaligus, yaitu 'melawan' ideologi mereka dan menjaga agar masyarakat tetap moderat. Selain itu, para kiai juga perlu mendoakan orang Islam yang seperti ini agar kembali kepada jalan agama yang moderat.

Kedua, pimpinan atau ideolog tingkat menengah. Mereka ini masih bisa disentuh, sekaligus sangat susah diajak berdialog. Perlu cara khusus untuk mendekati mereka. Misalnya, dengan melibatkan pimpinan pesantren atau ormas Islam yang kredibel reputasi dan integritasnya serta cukup dikenal publik untuk mengajak mereka dialog. Sekalipun pimpinan kelompok Islam radikal sering tampil tanpa alamat yang jelas, namun dengan metode jempit bola atau turun ke bawah, pelan tapi pasti pesan yang disampaikan akan sampai ke tingkatan yang lebih tinggi. Setelah bertemu, dialog dapat menjadi cara tepat untuk melakukan deradikalisasi.

Ketiga, penganut yang masih ikut-ikutan. Bagian ini sesungguhnya relatif mudah dijinakkan. Tapi biasanya tampilan mereka lebih 'garang' dibanding pimpinannya. Pelaku deradikalisasi perlu memahami latar belakang keluarga, jama'ah atau kebiasaan ikut pengajian, ekonomi, sosial, pendidikan yang bersangkutan, sehingga ditemukan pintu masuk pada bagian mana yang tepat. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan lahan yang dapat menyuburkan ideologi radikal

Pendapat kiai di atas tampaknya sesuai dengan pandangan Ketua Yayasan Prasasti Perdamaian, Noor Huda Ismail. Ia mengatakan bahwa para aktivis jihad itu berkelas-kelas, ada jihad putih, jihad hitam, dan jihad abu-abu. Kelompok putih adalah ideolog dan orang-orang inti gerakan teror yang hampir tak mungkin dibelokkan, sebaliknya "si hitam" dan "si abu-abu" yang keyakinan spiritualnya tak sekukuh si putih, masih bisa diluruskan. Biarlah "si putih" menjadi urusan hukum, tapi "si hitam" dan "abu-

abu" yang merupakan mayoritas pelaku teror di lapangan, mesti didekati untuk meninggalkan kekerasan (Sidik, 2010).

Jika pemicu kekerasan atas nama agama itu karena masalah kemiskinan, menurut salah seorang kiai, pemberdayaan ekonomi bisa menjadi salah satu jalan deradikalisasi. Sebab *kadal faqru an yakuna kufran* (kekefuran hampir-hampir membuat seseorang menjadi kufur). Tetapi juga harus diingat, ada orang-orang yang sudah mapan kehidupan ekonominya tetapi tetap jadi radikal.

Pengasuh pesantren di Pedurungan mengaku agak sulit dan rumit mengurai radikalisme Islam, sepanjang pemahaman mereka tetap berada di *frame* dikotomik-diametral (Timur versus Barat). Sementara *frame* Timur-Barat itu dalam pemahaman mereka adalah ketidakadilan. Jika ketidakadilan dan kesewenang-wenangan Barat atas dunia Islam tidak hilang, radikalisme Islam akan tetap tumbuh berkecambah.

Tetapi kalau akar masalah radikalisme adalah pemahaman, menurut kiai di atas, mungkin pesantren masih bisa melakukan deradikalisasi. Pemahaman luas tentang Islam menjadi penting. Islam jangan hanya dilihat dalam hubungan antara muslim dengan non-muslim saja, tapi juga muslim dengan dunia, alam, seluruh manusia (*rahmatan lil'alam*). Hubungan Islam-nonmuslim jangan dipenuhi dengan unsur prasangka, cemburu, atau kecurigaan. Sebab kalau seperti itu, akhirnya Islam penuh kecurigaan. Dalam konteks dakwah, Islam itu tidak bersikap negatif terhadap non-Muslim. Dakwah itu selalu positif dengan apapun dan siapapun, sebagaimana contoh Nabi Muhammad.

Kalau mau dibuat tahap-tahap deradikalisasi, dapat dibuat urutan misalnya. *Pertama*, harus hijrah ke komunitas yang moderat. *Kedua*, dilanjutkan dengan dialog atau kajian Islam intensif. Tema dialog adalah kontra-ideologi terhadap doktrin-doktrin yang selama ini dipegangi. Kunci deradikalisasi memang penyadaran dan dialog. *Ketiga*, penggunaan konseling dan pendekatan psikologis. Empati dan

simpati harus dikembangkan untuk mendekati mereka. Penggunaan istilah Islam radikal mestinya juga harus dihindari karena dapat menyakiti hati mereka.

Menurut kiai yang tinggal di Tlogosari, untuk melawan radikalisme tidak hanya dari satu sisi saja tetapi harus integral, sebab akar radikalisme cukup luas. Eksekutif dan legislatif harus bisa membuktikan bahwa konsep Negara bangsa itu mampu menjawab masalah rakyat. Di samping itu, penjelasan (masalah) agama (di sekolah—pen) agar diberi porsi yang cukup supaya dapat diketahui detail-detailnya dan dikaji dari berbagai sisi. Dalam jangka panjang, deradikalisasi lewat sekolah harus diperhatikan dengan cara jam pendidikan agama harus diberi porsi yang cukup.

Dengan dialog saja tidak cukup untuk menjinakkan pelaku radikalisme. Di sisi lain, Negara ini tidak tegas terhadap kelompok-kelompok agama yang jelas-jelas ingin merusak pondasi Negara dengan mendirikan khilafah (Islamiyyah). Oleh karena itu, menurutnya, ormas-ormas Islam yang menyokong, mengayomi dan menumbuhkan sikap radikal harus ditindak tegas. Sebab lebih mudah membentuk muslim radikal, ketimbang muslim moderat. Salah seorang narasumber penelitian berani menjamin, cukup diberi waktu 6 bulan, seorang muslim bisa menjadi muslim radikal. Tetapi hal ini tidak berlaku untuk membentuk menjadi muslim moderat.

Salah satu cara untuk melawan radikalisme adalah memperkuat lembaga-lembaga pendidikan agama tradisional. Perkuat saja lembaga-lembaga pendidikan tradisional (seperti pesantren), maka dengan sendirinya Pancasila akan kuat. Islam juga akan tumbuh menjadi moderat. Pendidikan sekarang ini berorientasi Barat yang hanya transfer pengetahuan saja. Akhirnya yang dilakukan dan dipilih adalah yang instan-instan saja. Agama diambil yang praktis-praktis, tidak mau repot memikirkan hakekat ajaran agama.

Untuk mempermudah membaca dan memahami jawaban-jawaban kiai di atas, maka keseluruhan pandangan kiai tentang

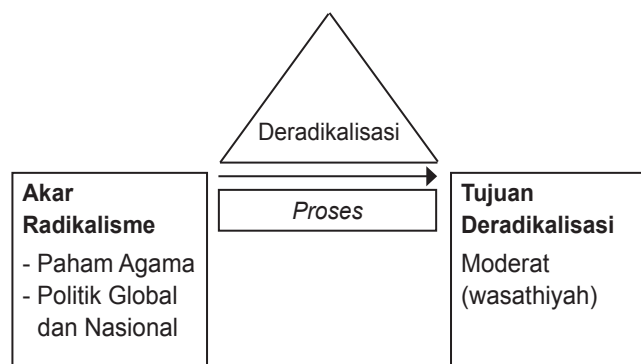
deradikalisasi Islam radikal disusun ringkas dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Deradikalisasi Islam Radikal

No.	Informan	Program/ Tahapan Deradikalisasi
1	HM	Menangkal paham (kontra-ideologi). Menghilangkan penumbuh/ penyubur radikalisme (kemiskinan, ketidakadilan).
2	M	Reedukasi (mengkaji Islam lebih komprehensif). Menasehati/ dialog dengan pelaku. Sosialisasi bahaya radikalisme Pemerintah harus tegas terhadap penyokong, penganjur, pengajar, pelaku radikalisme
3	HI	Memetakan pelaku radikalisme (pimpinan, menengah, simpatisan) Kampanye besar-besaran anti-radikalisme (media, mimbar masjid, jama'ah pengajian) Jemput bola dan dialog dengan penganjur, penyokong, pelaku radikalisme Mengenali problem duniawi (misalnya, kalau memiliki problem ekonomi, diberdayakan ekonominya)
4	AK	Tidak menggunakan kekerasan (anti-kekerasan dalam penyadaran) atau dialog Hijrah ke komunitas baru yang moderat Pemberdayaan ekonomi (jika akarnya kemiskinan)
5	AN	Hijrah Re-edukasi ajaran Islam dan dialog Konseling dan psikologi Memfasilitasi kebutuhan pelaku
6	US	Deradikalisasi integral Membuktikan bahwa nation-state dapat menjawab masalah bangsa Penambahan jam pelajaran agama di sekolah (deradikalisasi kurikulum PAI) Memperkuat lembaga pendidikan pesantren Negara bertindak tegas terhadap pendukung, pengayom, penganjur dan pengajar radikalisme

Deradikalisasi merupakan kerja lanjutan setelah diketahui akar radikalismenya. Sebagian besar jawaban informan memiliki konsistensi seperti itu, yakni kesesuaian antara akar radikalisme dan usulan deradikalisasinya. Misalnya, sebagian besar informan menyebut bahwa paham terhadap agama yang kurang tepat dianggap sebagai akar radikalisme, kemudian deradikalisasi yang diusulkan adalah mengkaji kembali Islam secara utuh, baik lewat dialog, nasehat, penyadaran, konseling dan seterusnya.

Hubungan kerja antara akar radikalisme, strategi deradikalisasi dan tujuan deradikalisasi, dapat digambarkan dalam segitiga deradikalisasi (*triangle of deradicalization*).



Gambar 3.1. Triangle of Preventive and Preservative Deradicalization

Dari gambar di atas dapat dipahami bahwa deradikalisasi dapat dimulai langsung dari akar radikalisme yang dimaksudkan sebagai deradikalisasi pencegahan (*preventive deradicalization*) dan pemeliharaan (*preservative deradicalization*) Islam moderat. Dengan model ini, deradikalisasi bersifat proaktif dan tidak menunggu sampai terjadi, misalnya aksi terorisme. Selain itu, model yang pertama juga dapat digunakan untuk deteksi dini apakah seseorang atau sekelompok orang berpotensi berpikir dan bertindak radikal. Aktor yang terlibat dalam deradikalisasi model yang pertama ini adalah negara, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan isi atau program deradikalisasinya, meliputi hal-hal sebagai berikut: a) re-edukasi (memahami Islam lebih utuh); b) kampanye anti radikalisme; c) menghilangkan pemicu atau penumbuh subur radikalisme (misalnya, kemiskinan dan ketidakadilan); d) negara bertindak tegas terhadap penyokong, penganjur, pengajar radikalisme.

Di samping itu, deradikalisasi juga dapat dilakukan setelah seseorang menjadi radikal (*curative deradicalization*). Model ini bersifat menyembuhkan bagi pelaku radikalisme, baik sebelum maupun setelah terjadi aksi radikal (teror), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, seseorang yang menjadi radikal dalam pikiran dan paham keagamaan. Mereka membutuhkan strategi dan program deradikalisasi yang berbeda. Selain membutuhkan program deradikalisasi gambar no. 3, juga dibutuhkan langkah-langkah yang lain, seperti a) dialog intensif; b) hijrah kepada komunitas yang baru; c) pendekatan konseling dan psikologis. Aktor yang terlibat dalam deradikalisasi model yang pertama ini adalah negara, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

Kedua, seseorang yang sudah melakukan tindakan teror, yang berhasil ditangkap, diadili dan dipenjarakan. Dalam hal ini, pemerintah sudah memiliki strategi deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT, yaitu reedukasi, rehabilitasi, reintegrasi dan resosialisasi. Menurut ICG, deradikalisasi di atas masih perlu ditambah dengan reformasi penjara atau Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan isi atau program reedukasi pelaku teror dapat mengacu pada pendapat atau usulan atau pandangan dari kiai-santri seperti yang dijelaskan di atas.

Perlu diketahui bahwa pandangan dunia pesantren (kiai) tentang deradikalisasi Islam radikal masih berupa konsep (ada yang masih sangat mentah) dan tentu tidak dapat langsung diterapkan (*non-applicable*). Diperlukan kajian lain yang dapat menghasilkan modul atau kurikulum deradikalisasi yang lengkap dan implementatif. Modul deradikalisasi juga harus memperhatikan 'siapa' yang dihadapi. Setiap pelaku radikalisme membutuhkan modul yang berbeda. Hal ini disebabkan masing-masing pelaku radikalisme bersifat unik dan tidak dapat disamakan dengan yang lain.

PENUTUP

Berdasar kajian di atas, perlu langkah-langkah antisipatif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan bibit radikalisme Islam. Mendesak dilakukan reorientasi pendidikan Islam yang tidak hanya fokus pada masalah ibadah, aqidah dan fiqh, tetapi juga akhlak harus mendapat banyak perhatian. Dengan demikian,

siapa saja boleh memiliki semangat tinggi untuk menyebarkan agama Islam atau bahkan merasa paling benar sendiri sekalipun tapi ia harus tetap berakhlak mulia dimanapun dan kapanpun.

Akar radikalisme yang bersumber pada isu politik global dan nasional perlu disikapi dengan mengedepankan tata dunia baru yang adil. Barat dan Timur ibarat sepasang sepatu yang dapat berjalan sejajar tanpa saling mematikan. Barat tak ada artinya tanpa Timur, begitu pula sebaliknya. Karena itu, konflik di Timur Tengah yang menjadi sebab umat Islam sangat membenci Barat perlu diselesaikan dan diakhiri secara adil dan damai. Begitu pula dengan situasi politik nasional yang tidak kunjung ideal, menjadi tanggung jawab bersama untuk menyelesaikannya, seperti penegakan hukum, peningkatan kesejahteraan rakyat, pendidikan murah dan seterusnya.

Deradikalisasi merupakan kerja lanjutan setelah diketahui akar radikalisme paham Islam radikal. Oleh karena setiap pelaku radikalisme bersifat unik dan berbeda antara satu dengan yang lainnya, maka dibutuhkan penelitian lanjutan untuk menyusun modul deradikalisasi paham Islam radikal yang lebih komprehensif dan aplikatif. Modul ini akan menjadi panduan bagi kerja deradikalisasi, baik untuk deradikalisasi pencegahan maupun penyembuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mudhofir. 2009. *Jihad Tanpa Kekerasan*. Solo: Intimedia.
- Al-Asymawi, Muhammad Said. 1987. *Al-Islam al-Siyasi*. Kairo: Sina li al-Nasyr.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid. 2001. *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atmasasmita, Romli, 2011, "Deradikalisasi dan Tindak Pidana Terorisme," dalam *Seputar Indonesia*, 25 April.
- Hendropriyono, AM., 2009. *Terorisme Fundamentalisme Kristen Yahudi Islam*, Jakarta: Kompas.
- International Crisis Group, 2007. "Deradikalisasi dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Asia Report N°142.
- Mbai, Ansyad. 2011. *Dialog Publik Radikalisme, Terorisme dan Deradikalisasi Paham Radikal*, diselenggarakan MUI Jawa Tengah, 3 Desember.
- Mudzhar, Mohammad Atho. 1993. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: INIS.
- Nasution, Harun. 1995. *Islam Rasional*. Bandung: Mizan.
- Salim, Arskal dan Azyumardi Azra, 2003, "Introduction: The State and Shari'a in the Perspective of Indonesian Legal Politics," dalam *Sharia and Politics in Modern Indonesia*, ed. Arskal Salim and Azyumardi Azra, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Shaban, MA. 1994. *Islamic History*. Cambridge: CUP.
- Sidik, Jafar M., "Terorisme, Semiotika dan Bahasa Indonesia" dalam *Kompas*, 6 Oktober 2010.
- Sofwan, Ridin. 2004. "Para Wali Mengislamkan Tanah Jawa" dalam *Merumuskan Kembali Interrelasi Islam-Jawa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Thohir, Mudjahirin. 2011. "Deradikalisasi Keagamaan dalam Perspektif Sosial-Budaya," dalam Seminar Nasional, *Deradikalisasi Agama Melalui Peran Muballigh di Jawa Tengah*, 20 Juli 2011.
- Wahid, Abdurrahman (ed.). 2009. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: Wahid Institute.